

DAFTAR PUSTAKA

buku

Lexy J. Moleong, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hlm, 6.

Miriam Budiarto, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
Hlm. 13

Miriam Budiarto, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 17-18

Rauf, Maswadi, 2001, *consensus dan konflik politik*, DIKTI, Jakarta. Hal 19

Samugyo Ibnu Redjo, **Sistem Politik Dan Kepartaian Di Indonesia: Dinamika Partai Politik dan Golongan Karya Era Orde Baru**, (Bandung: Dian Cipta, 2014), hlm. 68.

Sigit Pamungkas, **Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia** (Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai, 2011), hlm 3-6

Susi Fitria Dewi, **Sosiologi Politik**, (Yogyakarta: GRE PUBLISHING, 2017), Hlm. 117.

Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm. 72

W.A. Robson, **The University Teaching of Social Sciences: Political Science (Teaching in the Social Sciences)**; Paris: UNESCO, 1954), hlm. 24.

Skripsi

Ach Busairi, **Skripsi Dualisme Kepemimpinan Dalam Partai Golkar**. Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016

Citra Putri Utami, **Skripsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Dan Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Partai Hanura Tahun 2018)**. Program Sarjana, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

website

<https://news.detik.com/lembaga-survei-indonesia/d-1062883/partai-demokrat-kalahkan-pdip-dan-golkar/> diakses pada hari Kamis, 30 September 2021 jam 8.13 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/11/1820238/Ini.Hasil.Survei.yang.Berbeda.dengan.Hasil.Hitung.Cepat/> Diakses pada hari Kamis, 30 September 2021 jam 8.43 WIB

Dokumen

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hanura tahun 2015.

Pengesahan Restrukturisasi dan Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Periode 2019-2024.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Elit, anggota, dan pengurus partai Hanura pihak Wiranto

Nama			
Jabatan/instansi			
Hari/Tanggal		Pukul	

1. Apakah ada permasalahan yang terjadi saat pak Wiranto memutuskan memundurkan diri sebagai ketua umum partai Hanura?
2. Mengapa, terjadinya aklamasi di dalam pemilihan ketua umum yang baru?
3. Di saat naiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum, mengapa muncul nama Daryatmo sebagai ketua umum yang baru?
4. Bagaimana berjalannya partai Hanura saat adanya dua tokoh yang menjadi ketua umum?
5. Apakah di dalam masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang terdapat kebijakan yang menimbulkan konflik internal tersebut?
6. Apa yang menyebabkan timbulnya dualisme di dalam partai Hanura?
7. Apakah persaingan antara Oesman Sapta Odang dengan Daryatmo hanyalah perebutan kekuasaan kursi ketua umum?
8. Apakah ada kepentingan yang di bawa oleh Oesman Sapta Odang dan Daryatmo yang mrenyebabkan konflik internal partai Hanura?
9. Apakah konflik internal tersebut memberikan dampak terhadap elektabilitas partai Hanura?
10. Bagaimana dampak dari konflik internal tersebut terhadap kinerja partai Hanura?

2. Elit, anggota dan Pengurus partai Hanura Pihak Oesman Sapta Odang.

Nama			
Jabatan/instansi			
Hari/Tanggal		Pukul	

1. Partai Hanura memiliki elektabilitas yang bagus di mata masyarakat di kepemimpinan Pak Wiranto, apakah turunnya Pak Wiranto dari posisi ketua umum menimbulkan permasalahan yang baru?
2. Di dalam pemilihan ketua umum yang baru, apakah hasil aklamasi dari Oesman Sapta Odang di setuju oleh seluruh pihak?
3. Jika tidak, mengapa terjadi adanya aklamasi?
4. Di saat berjalannya kepengurusan Oesman Sapta Odang, mengapa muncul nama Daryatmo sebagai ketua umum yang baru?
5. Apa dampak yang di berikan dengan munculnya dua sosok ketua umum Hanura?
6. Apakah ada kebijakan yang diambil oleh Oesman Sapta Odang yang menimbulkan permasalahan di dalam partai Hanura?
7. Mengapa banyak kader partai yang tidak setuju dengan kepemimpinan Oesman Sapta Odang?
8. Apa solusi yang diambil, dalam menyelesaikan konflik internal tersebut?

TRANSKRIP WAWANCARA



Nama	Bpk. Drs. Marwan Paris Dt. Maruhun Saripado, MBA.		
Jabatan/instansi	Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura		
Hari/Tanggal	Senin, 24 Januari 2022	Pukul	11.00 WIB

Pertanyaan :

1. Partai Hanura memiliki elektabilitas yang bagus di mata masyarakat di kepemimpinan Pak Wiranto, apakah turunnya Pak Wiranto dari posisi ketua umum menimbulkan permasalahan yang baru?

Jawaban :

merupakan hal yang lazim, karena adanya masalah, maka dilaksanakan munaslub dan terpilihnya pak Oesman Saptia Odang. Jika melihat dari mengapa terjadinya munaslub. Karena adanya masalah internal yang sulit untuk diselesaikan oleh organisasi maka dilaksanakan munaslub.

2. Di dalam pemilihan ketua umum yang baru, apakah hasil aklamasi dari Oesman Sapta Odang di setujui oleh seluruh pihak?

Jawaban :

Pada akhirnya menyetujui, namun pihak yang menginginkan adanya MUNASLUB adalah dari pihaknya Sariffudin Sudding yang di dukung oleh pak wiranto. Sempat sampai ke pengadilan tinggi. Namun dari pihak kami OSO mampu menyelesaikan masalah tersebut

3. Jika tidak, mengapa terjadi adanya aklamasi?

Jawaban : Karena pada akhirnya disetujui oleh partai.

4. Di saat berjalannya kepengurusan Oesman Sapta Odang, mengapa muncul nama Daryatmo sebagai ketua umum yang baru?

Jawaban :

nama daryatmo merupakan hasil dari munaslub dan menghasilkan kepemimpinan Ganda. Namun secara de facto, tidak pernah berjalannya kepemimpinan Daryatmo, dan beberapa pengurus di kepengurusan daryatmo banyak yang mengundurkan diri karena tidak adanya kekompakkan.

5. Apa dampak yang di berikan dengan munculnya dua sosok ketua umum Hanura?

Jawaban :

walaupun secara yuridis pihak Oso menang, namun permasalahan tidak menghilang. Maka berdampak sampai dengan kosongnya kursi Hanura di dpr. Walaupun sudah adanya kepemimpinan ganda, namun kepengurusan daryatmo tidak berjalan sama sekali. Namun tetap adanya persitengan di dalam partai.

6. Apakah ada kebijakan yang diambil oleh Oesman Sapta Odang yang menimbulkan permasalahan di dalam partai Hanura?

Jawaban :

tidak ada, karena pada dasarnya Gerakan ini di dalam tubuh partai tidak ada wujudnya, maka tidak perlu mengambil kebijakan apapun terkait konflik di dalam partai. Bahkan konflik ini bisa dibilang tidak terlihat karena sembunya-sembunyi.

7. Mengapa banyak kader partai yang tidak setuju dengan kepemimpinan Oesman Sapta Odang?

Jawaban :

Dengan alasan bahwa OSO otoriter, single fighter. Namun kepengurusan OSO tetap solid dan memenangkan di pengadilan.

8. Apa solusi yang diambil, dalam menyelesaikan konflik internal tersebut?

Jawaban :

secara de facto sudah selesai. Karena banyak yang sudah pindah ke partai lain, dan banyaknya kepengurusan Daryatmo yang sudah bubar. Seperti sariffudin sadding yang sudah Pindah ke partai PKB. Jadi soliditasnya sudah tidak ada lagi. Namun sampai tahun 2020 masih terasa dan sampai

saat ini sudah tidak terasa lagi. Kami mencoba melakukan merekonsiliasi namun tidak berguna karena banyaknya kepengurusan daryatmo yang sudah tidak aktif dan pindah partai baru.



TRANSKRIP WAWANCARA



Nama	Bpk. DR (YURIS). DR(MP). H. Teguh Samudera, SH. MH.		
Jabatan/instasi	Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura		
Hari/Tanggal	Kamis, 27 Januari 2022	Pukul	19.00 WIB

1. Apakah ada permasalahan yang terjadi saat pak Wiranto memutuskan memundurkan diri sebagai ketua umum partai Hanura?

Jawaban :

Saat pak wiranto di angkat menjadi menkoplhukam, kemudian kepengurusan partai Hanura, diserahkan kepada bapak jendral chairudin ismail LANCAR, TIDAK ADA MASALAH, kemudian setelah itu kepengurusan kembali pada pak wiranto. Setahu saya setelah jendral wiranto memimpin kembali di Hanura. Baru terjadi Gerakan di internal menyangkut masalah kepengurusan.

2. Mengapa, terjadinya aklamasi di dalam pemilihan ketua umum yang baru?

Jawaban :

Dulu ada dokumen, dari siapa (nama). Lalu saya diserahkan tugas oleh ketua umum, oleh pak Jendral Wiranto untuk mengumpulkan data. Ada persoalan apa di bawah (Internal Hanura) yang terjadi. Lalu saya memperoleh data adanya keinginan penggantian ketua umum, akhirnya saya memperoleh dari tugas ini saya laporkan kepada bapak wiranto. Benar ada nama Oesman Sapta Odang dari calon-calon yang akan memimpin partai.

3. Di saat naiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum, mengapa muncul nama Daryatmo sebagai ketua umum yang baru?

Jawaban :

Dengan berjalannya waktu akhirnya disetujui tentang deal apa dari jendral wiranto dengan Bapak oesman odang, saya tidak tahu karena private. Yang jelas bapak jendral memilih dan menyetujui dirinya sebagai ketua umum Hanura. Sehingga saat itu tidak ada 2 tokoh, namun 1. Dari pak wiranto di ganti menjadi oso.

4. Bagaimana berjalannya partai Hanura saat adanya dua tokoh yang menjadi ketua umum?

Jawaban :

Ini setau saya. Berjalannya waktu selama pak oso mengurus, terjadi konflik yang saya tidak ketahui. Namun terjadi hiruk pikuk sehingga ada kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai pengurus partai. Dan ada yang mendukung

supaya ada MUNASLUB dan pak wiranto kembali menjabat sebagai ketua umum Hanura.

5. Apakah di dalam masa kepemimpinan Oesman Sapta Odang terdapat kebijakan yang menimbulkan konflik internal tersebut?

Jawaban :

Saya dihubungi oleh pengurus partai, yaitu dari pengurus OSO, Namanya pak Yus Usman Kusumanegara meminta konsultasi dengan saya. “bagaimana dengan adanya kepengurusan yang sah seperti ini, namun ada kelompok lain yang mengadakan munaslub dan mengangkat pak Daryatmo sebagai ketum?”. Saya memberikan masukan secara hukum kepada rekan saya. Yus Usman Kusumanegara bahwa hendaknya ketetapan partai politik itu harus dikuatkan dengan adanya hasil keputusan di dalam munaslub atau munas. Oleh karenanya saya mengingatkan pada pak yos usman agar mencermati dan mengecek kembali apakah susunan kepengurusan DPP Partai Hanura yang ketua umumnya OSO itu sudah dilaporkan ke menkumham dan sudah mendapat pengesahan kepengurusan atau belum? Karnanya harus dilakukan hari ini juga. Jika ada organisasi kepengurusan DPP partai Hanura dengan ketua umum oso jika ada perubahan maka harus ada pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM. Pak yos usman harus membawa dokumen itu, dilaporkan, dan ditunggukan agar keluar keputusan pengesahannya. Sehingga SK menkumham kepengurusan DPP Partai Hanuradi bawah pak OSO sah adanya. Dan ternyata saya diberitahukan bahwa hari itu atau hari berikutnya sudah mendapatkan pengesahan dari MENKUMHAM. Dan SK itulah, (SK Oesman Sapta Odang)

sah secara HUKUM yang berlaku di INDONESIA. Dan karenanya saya dapat info juga hasil MUNASLUB (Kubu Daryatmo) tidak pernah dilaporkan dan tidak dimintakan persetujuan kepada KEMENKUMHAM.

6. Apa yang menyebabkan timbulnya dualisme di dalam partai Hanura?

Jawaban :

Karena di dalam partai menyangkut kekuasaan karna dengan partai inilah akan memperoleh kedudukan baik di dalam pemerintahan pusat maupun daerah, bahkan di Parlemen, DPR RI, DPRD Provinsi, juga DPRD Kabupaten atau kota. Sehingga masalah seperti ini yang timbul di suatu partai. Karena kewenangan kekuasaan dan kekuatan ketua umum sangat luas. Contoh, secara internal dalam melakukan kaderisasi, calon-calon anggota legislative baik tingkat Pusat DPR RI, tingkat I Provinsi, Tingkat II Kabupaten Kota. Itu adalah calon-calon anggota legislatifnya, semua harus di seleksi. Partai memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menunjuk siapa yang akan jadi calon. Lalu setelah lolos pemilu legislative penempatannya, siapa, di komisi berapa dan sebagainya di DPR RI semua kewenangan DPP Partai Hanura. Selain itu, calon kepala daerah baik tingkat 1 maupun 2 juga calon presiden semuanya akan berebut minta dukungan atau rekomendasi terhadap partai. Dalam praktik-praktik dukungan itu sudah banyak dengar adanya kegiatan saling menguntungkan kedua belah pihak. Ada mahar untuk rekomendasi atau dukungan yang di berikan, entah mahar tersebut berupa janji politik atau hal lainnya, (namun) itu ada. Ini semua yang menjadikan magnet bagi pengurus yang tahu tentang politik yang menjelma di dalam partai politik di dalam kegiatan seharianya. Inilah yang

menjadikan hasrat orang-orang untuk menjadikan ketua partai. Dari yang saya jelaskan semua ini. Dualisme muncul karena hal-hal tersebut, karena adanya godaan uang di dalamnya.

7. Apakah persaingan antara Oesman Sapta Odang dengan Daryatmo hanyalah perebutan kekuasaan kursi ketua umum?

Jawaban :

Wujudnya, kursi ketua umum, namun dibelakangnya semuanya apa yang saya uraikan tadi. Karena kekuasaan ketua umum yang sangat besar dan kuat, untuk menentukan rekomendasi calon pemimpin daerah, calon presiden, itu ada di ketua umum partai. Sama halnya dengan rekomendasi Legislatif. Sehingga bukan hanya kursi, namun karena kekuatan dan kewenangan-kewenangan dari ketua umum sesuai dengan undang-undang partai politik.

8. Apakah ada kepentingan yang di bawa oleh Oesman Sapta Odang dan Daryatmo yang mnyebabkan konflik internal partai Hanura?

Jawaban :

Jelas ada kepentingan, yang saya ketahui karena kekuatan dan kewenangan ketua umum itulah yang merupakan salah satu factor.

9. Apakah konflik internal tersebut memberikan dampak terhadap elektabilitas partai Hanura?

Jawaban :

Jelas, konflik internal sangat mempengaruhi elektabilitas partai politik, karenanya bagi partai yang cerdas dia akan mencegah terjadinya konflik internal. Dulu bahkan penguasa suka membuat partai yang kuat lemah, maka

terjadinya hiruk pikuk pencah belahan parpol yang kuat dan solid maka muncul partai baru, sangat mempengaruhi. Contohnya, Hanura hanya tidak memiliki wakil lagi di DPR RI. mempunyai 0 kursi, di senayan. Walaupun di daerah masih banyak namun kita yang memiliki 16 kursi kemarin hilang semua karena tidak solid. Hal tersebut merupakan bukti, bahwa gilanya akan kepentingan dan kekuasaan memberikan dampak yang buruk. Bahkan di Solo sendiri di tempat berdirinya Hanura, wakil DPRD tingkat II di Kota Solo hilang kursinya dari kuasa Hanura. Bahkan Hanura juga kehabisan kursi di Jawa Tengah. Sehingga konflik internal partai sangat merugikan.

10. Bagaimana dampak dari konflik internal tersebut terhadap kinerja partai Hanura?

Jawaban :

berantakan, karena harusnya konsentrasi dengan meningkatkan kualitas kader yang sudah ada, dan bagaimana metode untuk pemilu legislative, kepala desa, bahkan Presiden, konsentrasinya kacau balau dan mengakibatkan banyak yang terlantar. Karena jika di pusat (DPP) ada gejolak maka di daerah juga ada gejolak. Sehingga kinerjanya buruk. Tidak ada proses-proses yang berjalan sebagaimana mestinya. Melakukan pengkaderan, membesarkan partai, menumbuhkembangkan pemilih-pemilih di desa yang sangat penting sebagai lumbung suara di masing-masing dapil, tidak terurus dengan adanya konflik internal ini. Maka contoh nyata yang terjadi adalah kehilangannya kursi di DPR RI.